

# PELAKSANAAN POLITICAL WILL PEMERINTAH DAERAH DALAM PENURUNAN STUNTING DI KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Fadhil Dimas Hernady

NPP. 32.0751

*Asdaf Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan*

*Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: [32.0751@praja.ipdn.ac.id](mailto:32.0751@praja.ipdn.ac.id)

Pembimbing Skripsi: Dr. Andi Azikin, M.Si.

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** Stunting is a strategic issue that impacts the quality of human resources and requires strong political will from the government. Although Banjarbaru City has shown a significant decrease in the prevalence of stunting. However, the problem of stunting has not been fully resolved. This requires continuous efforts to achieve the zero stunting target. **Purpose:** This study aims to analyze the implementation of the political will of the local government in reducing stunting in Banjarbaru City, South Kalimantan. **Method:** This research uses a qualitative descriptive method. This method was chosen because the qualitative model provides full flexibility for researchers to change the direction of research in the middle of activities in order to achieve the main objectives of the research. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation as well as data triangulation. The main theory used to analyze this topic is the Political will Theory by Brinkerhoff (2010). There were 10 informants involved in this research. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation as well as conclusion drawing and verification. **Result:** The results of the research related to the role of political will in resolving stunting cases in Banjarbaru City were analyzed through several dimensions with the results, in the dimension of government initiatives, it is known that the Banjarbaru City Government showed a strong initiative through the launch of the BASINGSING program, the priority dimension shows that the issue of stunting is made one of the regional development priorities, the dimension of mobilization of parties results in the Government succeeding in building cross-sector collaboration through a pentahelix approach, the Public Commitment and Resource Allocation dimension shows that there is an adequate budget allocation through the Special Allocation Fund (DAK), APBN fiscal incentive funds and CSR support from private partners such as PT PLN Kalselteng, the law enforcement dimension Perwali Number 1 of 2023 concerning the Acceleration of Stunting Reduction becomes the legal basis that provides legitimacy, the business continuity dimension shows that stunting reduction efforts are carried out consistently and sustainably, the Adaptation and Learning dimension with the result that the Banjarbaru City Government actively evaluates the program through a routine reporting system. **Conclusion:** In general, the results of research related to the Political will of the Banjarbaru City Government, especially at the Banjarbaru City Health Office studied by researchers using Brinkerhoff's theory in 2010, have gone well with some improvements.

**Keywords:** *Political Will, Success, Stunting, Local Government*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Stunting merupakan isu strategis yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan menuntut adanya *political will* yang kuat dari pemerintah. Meskipun Kota Banjarbaru telah menunjukkan penurunan yang signifikan pada prevalensi

stunting. Namun meskipun demikian permasalahan *stunting* belum sepenuhnya terselesaikan. Hal ini menuntut upaya berkelanjutan untuk mencapai target *zero stunting*. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan *political will* Pemerintah Daerah dalam menurunkan angka stunting di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih karena model kualitatif memberikan keleluasaan penuh bagi peneliti untuk mengubah arah penelitian ditengah kegiatan demi tercapainya tujuan utama penelitian. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi serta triangulasi data. Teori utama yang dipakai untuk menganalisis topik ini adalah Teori *Political will* oleh (Brinkerhoff, 2010), Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini sebanyak 10 informan. Analisis data dilaksanakan melalui reduksi data, penyajian data dan juga penarikan kesimpulan dan verifikasi. **Hasil/Temuan:** hasil penelitian terkait peran *political will* dalam menyelesaikan kasus stunting di Kota Banjarbaru dianalisis melalui beberapa dimensi dengan hasil, pada dimensi inisiatif pemerintah diketahui Pemerintah Kota Banjarbaru menunjukkan inisiatif yang kuat melalui peluncuran program BASINGSING, pada dimensi prioritas menunjukkan bahwa Isu *stunting* dijadikan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah, dimensi mobilisasi para pihak menghasilkan Pemerintah berhasil membangun kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan pentahelix, dimensi Komitmen Publik dan Alokasi Sumber Daya menunjukkan Terdapat pengalokasian anggaran yang memadai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), dana insentif fiskal APBN dan dukungan CSR dari mitra swasta seperti PT PLN Kalselteng, dimensi penegakan hukum Perwali Nomor 1 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting menjadi dasar hukum yang memberikan legitimasi, pada dimensi kontinuitas usaha menunjukkan Upaya penurunan stunting dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, pada dimensi Adaptasi dan Belajar dengan hasil Pemerintah Kota Banjarbaru aktif melakukan evaluasi program melalui sistem pelaporan rutin. **Kesimpulan:** Secara umum hasil penelitian terkait *Political will* Pemerintah Kota Banjarbaru khususnya pada Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru yang dikaji peneliti menggunakan teori Brinkerhoff tahun 2010 sudah berjalan dengan baik dengan beberapa perbaikan.

**Kata Kunci: Political Will, Keberhasilan, Stunting, Pemerintah Daerah**

## **I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

*Political will* merupakan suatu elemen fundamental dalam proses kepemimpinan politik, terutama di tingkat lokal (Scott, 2013). Konsep ini mencerminkan kesediaan dan komitmen pemimpin politik untuk mengambil tindakan strategis yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat. *Political will* atau keinginan politik yang diartikan sebagai “niatan pemimpin” untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk kebaikan bersama dalam jangka panjang. Keinginan politik mengacu pada kesediaan dan komitmen pemimpin politik dalam melakukan tindakan yang bertujuan untuk mencapai seperangkat tujuan yang disertai dengan usaha berkelanjutan (Pepinsky, 2018). Dalam banyak keadaan, menciptakan *political will* dijadikan tugas untuk mengembangkan kapasitas pemerintah. Mengenai *political will*, bahwa pemerintahan yang baik itu perlu kekuatan politik, efektivitas pemerintah dan keterlibatan aktif dari negara serta organisasi sosial masyarakat. Implikasinya adalah program yang dimiliki pemerintah tentu melibatkan publik, karena dasar dari pemerintah adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Ilham & Sari, 2024).

Di Indonesia, *political will* pemimpin daerah menjadi faktor penentu keberhasilan dalam menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi (Saragih et al., 2019). Dalam sistem desentralisasi, kepala daerah memiliki wewenang untuk menentukan prioritas pembangunan dan mengarahkan sumber daya secara efektif. Keberadaan *political will* yang kuat memastikan

bahwa pemimpin politik tidak hanya memiliki visi strategis, tetapi juga mampu mewujudkannya dalam bentuk program sesuai dengan kebutuhan setempat bagi masyarakat. *Political will* memainkan peran penting dalam menangani masalah-masalah yang bersifat multidimensi, termasuk *stunting*. Masalah ini membutuhkan koordinasi lintas sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi (Soemaatmadja et al., 2020). Tanpa *political will*, inisiatif untuk mengatasi *stunting* sering kali terhenti di tingkat perencanaan tanpa menghasilkan dampak yang signifikan. Oleh karena itu, pemimpin politik yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap isu-isu ini mampu menciptakan solusi yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Negara-negara dengan tingkat komitmen politik yang cukup tinggi terhadap *stunting* cenderung memiliki penurunan yang lebih signifikan dalam prevalensi *stunting* dibandingkan dengan negara-negara yang kurang memiliki komitmen politik yang kuat (Gitasavitri et al., 2024). Hal ini menegaskan bahwa komitmen politik yang kokoh adalah kunci untuk meraih kemajuan yang berarti dalam penurunan angka prevalensi *stunting*. Komitmen politik yang kuat memainkan peran penting dalam membawa perubahan nyata di sektor kesehatan masyarakat. Tanpa adanya dukungan politik yang solid, berbagai upaya untuk menanggulangi *stunting* akan sulit untuk mencapai hasil yang optimal. Komitmen politik memainkan peran krusial dalam menanggapi tantangan *stunting* yang mempengaruhi kesehatan dan pembangunan manusia secara keseluruhan (Salsabila et al., 2024).

*Stunting* menjadi salah satu permasalahan serius seluruh negara di dunia, khususnya di banyak negara berkembang. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menjelaskan bahwa *stunting* merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, serta stimulasi sosial yang tidak memadai pada 1000 hari pertama kehidupan. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28B ayat 2 bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Merujuk pada pasal Undang-Undang ini maka menegaskan hak anak untuk dapat bertumbuh dan berkembang secara wajar. Kemudian negara berkewajiban untuk membuat kebijakan yang mampu mencegah dan menanggulangi *stunting* di Indonesia (Wihardja & Pepinsky, 2011). Tanggung jawab yang diamanatkan oleh konstitusi tersebut telah dipenuhi oleh Pemerintah Republik Indonesia, yaitu Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Jokowi Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.

Merujuk pada SKI (Survei Kesehatan Indonesia) yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan Indonesia bahwa persentase prevalensi *stunting* di tingkat nasional telah menurun dari 24,4% pada tahun 2021 menjadi 21,6% pada tahun 2022. Tahun 2023 berada di angka 21,5% yang berarti hanya terdapat penurunan sebesar 0,1%. Walaupun terdapat penurunan, tetapi persentase tersebut dinilai masih tinggi mengingat dengan acuan angka yang telah disebutkan masih sangat jauh dari ambang batas yang *World Health Organization* (WHO) tetapkan yaitu tidak boleh melewati angka 20%.

Secara khusus, Kalimantan Selatan menunjukkan dinamika yang unik dibandingkan provinsi lainnya. Pada tahun 2021, prevalensi *stunting* di Kalimantan Selatan tercatat sebesar 30,0%, menjadikannya salah satu provinsi dengan angka tertinggi di Kalimantan. Namun, pada tahun 2022 angka ini berhasil turun signifikan menjadi 24,6%, menunjukkan adanya intervensi yang efektif. Meski demikian, pada tahun 2023 angka ini sedikit meningkat menjadi 24,7%, sedikit di atas rata-rata nasional. Namun, Kota Banjarbaru menjadi salah satu daerah dengan angka *stunting* terendah di provinsi tersebut, yaitu 12,4% pada tahun yang sama. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilaksanakan oleh Kota Banjarbaru dalam percepatan penurunan *stunting* cukup baik akan tetapi masih perlu dioptimalkan untuk menjadikan indikator Perpres 72 sebagai target kinerja dan mengoptimalkan kerja sama lintas sektoral. Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023, Terdapat 5 Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan prevalensi *stunting*, dimana penurunan tertinggi berada di Kota

Banjarbaru sebesar 9,7% dari 22,1% pada tahun 2022 menjadi 12,4% di tahun 2023.

Keberhasilan Kota Banjarbaru dalam menurunkan angka prevalensi *stunting* terkait dengan kebijakan-kebijakan dan program yang merupakan hasil turunan dari visi dan misi Kota Banjarbaru serta janji politik Walikota yang tertuang dalam Program Pembangunan Daerah di RPJMD 2021-2026, sisi pembangunan Kota Banjarbaru yang akan dicapai selama lima tahun mendatang, yaitu: “Banjarbaru Maju, Agamis, Dan Sejahtera” (BANJARBARU JUARA). Untuk tujuan menurunkan prevalensi *stunting* ini diantaranya termaktub dalam misi Pertama “Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Yang Sejahtera Dan Berakhlak Mulia”. Sebagai ujung tombak pelaksanaan program, pemerintah daerah memainkan peran penting dalam menurunkan angka *stunting*. *Political will* pemerintah daerah tidak hanya diwujudkan melalui komitmen formal, tetapi juga dalam bentuk tindakan nyata seperti alokasi anggaran, pemberdayaan masyarakat, dan inovasi kebijakan (Lacombe & Boehmke, 2021).

Keberhasilan Kota Banjarbaru menunjukkan bahwa *political will* merupakan elemen kunci dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial seperti *stunting*. Pelaksanaan *political will* oleh pemerintah daerah di Kota Banjarbaru tercermin dalam upaya nyata menurunkan angka *stunting*.

## 1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Meskipun pemerintah daerah mungkin telah menunjukkan *political will* dalam bentuk kebijakan dan program untuk menurunkan angka *stunting*, seringkali terdapat kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan di lapangan. Penelitian ini dapat mengeksplorasi faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan tersebut, seperti kendala anggaran, kurangnya koordinasi antar instansi, atau hambatan birokrasi (Acs, 2021). Analisis mendalam tentang bagaimana kebijakan diterjemahkan menjadi aksi nyata, serta identifikasi bottleneck dalam proses implementasi, dapat memberikan wawasan berharga untuk meningkatkan efektivitas program penurunan *stunting* di Kota Banjarbaru.

*Political will* pemerintah daerah seringkali tidak cukup tanpa keterlibatan aktif dan sinergi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat itu sendiri. Penelitian ini dapat menganalisis sejauh mana pemerintah daerah Kota Banjarbaru telah melibatkan dan mengkoordinasikan berbagai pihak dalam upaya penurunan *stunting*. Celah yang mungkin ditemukan adalah kurangnya mekanisme kolaborasi yang efektif, rendahnya partisipasi masyarakat, atau belum optimalnya peran sektor swasta dalam mendukung program pemerintah. Eksplorasi terhadap model kemitraan yang inovatif dan inklusif dapat menjadi kontribusi penting dari penelitian ini.

*Political will* seringkali fluktuatif dan dapat berubah seiring dengan pergantian kepemimpinan atau prioritas politik. Penelitian ini dapat menggali bagaimana Kota Banjarbaru memastikan keberlanjutan program penurunan *stunting* di tengah dinamika politik lokal. Celah yang dapat dieksplorasi meliputi kurangnya mekanisme institusionalisasi program, ketergantungan pada figur pemimpin tertentu, atau belum adanya sistem monitoring dan evaluasi jangka panjang yang efektif. Analisis tentang bagaimana program dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan juga dapat menjadi fokus penting, mengingat *stunting* adalah masalah kompleks yang membutuhkan pendekatan yang adaptif dan berkelanjutan.

## 1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik namun memiliki beberapa celah untuk dikembangkan. Karya pertama oleh Desti Indriyani tahun 2023 berjudul *Political will* Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dalam Kebijakan Penanganan Kasus *Stunting* (Tahun 2016-2020) dengan hasil Penelitian mengungkapkan

bahwa Pemerintah Kulon Progo belum ditunjukkan komitmen politik yang cukup kuat dalam menangani angka *stunting* selama periode 2016 hingga 2020 (Indriyani & Yuanjaya, 2023).

Penelitian karya Mastaldiah tahun 2020 berjudul *Political will* Pemerintah Kota Palembang Dalam Mengatasi *Stunting* dengan hasil bahwa *political will* Pemerintah Kota Palembang telah menunjukkan kemauan politik dalam menangani masalah *stunting*, meskipun masih ada tantangan (Mastaldiah, 2020).

Penelitian ketiga karya Della Trijuliana tahun 2020 berjudul Komitmen Politik : Penegakan Hukum & Keberlanjutan Usaha Pemerintah Kota Tasikmalaya Dalam Upaya Menurunkan Angka *Stunting* dengan hasil bahwa keberhasilan penurunan angka *stunting* di Kota Tasikmalaya dari tahun 2016 hingga 2019 didukung oleh komitmen politik yang mencakup aspek penegakan hukum dan keberlanjutan usaha (Trijuliana et al., 2020).

Penelitian keempat karya Daniel Kamarudin tahun 2021 berjudul Komitmen Pemerintah Dalam Menangani *stunting* pada Kelurahan Mamasa Kabupaten Mamasa dengan hasil bahwa komitmen Pemerintah Daerah Kelurahan Mamasa, Kabupaten Mamasa, dalam menangani masalah *stunting*, yaitu gangguan pertumbuhan kronis pada balita yang berdampak pada fisik, kecerdasan, dan kesehatan jangka panjang (Daniel et al., 2021).

Penelitian terakhir karya Nanda Amalya tahun 2023 berjudul Komitmen Politik Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan dan Penurunan *Stunting* di Kecamatan Bone Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara dengan hasil bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam menurunkan prevalensi *stunting*, masih ditemukan ada beberapa tantangan yang dihadapi. Penelitian ini mengungkapkan bahwa keberhasilan kebijakan sangatlah bergantung pada kuatnya komitmen politik (Amalya, 2023).

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah yang signifikan dalam menganalisis pelaksanaan *political will* pemerintah daerah untuk menurunkan *stunting* di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dengan menerapkan pendekatan kualitatif yang mendalam dan inovatif berbasis model pentahelix. Studi ini tidak hanya mengeksplorasi komitmen politik pemerintah setempat, tetapi juga mengungkap dinamika interaksi dan sinergi antara lima elemen kunci masyarakat: pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas, dan media (ABCGM) dalam upaya penurunan *stunting*. Pendekatan kualitatif yang digunakan memungkinkan analisis mendalam terhadap kompleksitas implementasi kebijakan dan program *stunting*, mengungkap nuansa dan konteks lokal yang seringkali luput dari penelitian kuantitatif. Kebaruan lainnya terletak pada pengembangan kerangka analisis yang komprehensif untuk mengevaluasi efektivitas *political will* dalam konteks *stunting*, yang menggabungkan analisis dokumen kebijakan, wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan, dan observasi partisipatif terhadap pelaksanaan program. Penelitian ini juga menghasilkan tipologi baru tentang manifestasi *political will* dalam kebijakan publik kesehatan, yang dapat diaplikasikan untuk studi-studi serupa di daerah lain.

#### **1.5 Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan *political will* Pemerintah Daerah dalam keberhasilan penurunan *stunting* di Kota Banjarbaru.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengetahui

pelaksanaan *political will* Pemerintah Daerah dalam keberhasilan penurunan stunting di Kota Banjarbaru. Metode ini dipilih karena memiliki karakteristik lebih mampu mendeskripsikan topik dengan rinci dan mendalam (Sugiyono, 2023). Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah Teori *Political will* oleh (Brinkerhoff, 2010). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi semi partisipatif, studi dokumen dan juga wawancara terhadap informan yang ditentukan sesuai kapasitasnya. Cara pemilihan informan dalam penelitian ini didasarkan pada subjek yang terlibat langsung dalam penanganan stunting serta subjek yang menjadi sosok pemimpin wilayah sebagai pemegang penuh arah kebijakan, Adapun informan yang dipakai sejumlah 10 informan. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah Asisten II Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru dan juga Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, informan kunci merupakan informan yang memiliki pengetahuan luas dan mendalam serta dalam membahas topik tertentu yang memang menjadi keahliannya (Simangunsong, 2017). Teknik analisis data pada penelitian ini berlangsung pada beberapa tahapan yaitu reduksi data yang berserak dilapangan, penyajian data dalam bentuk narasi dan tabel maupun gambar, dan juga penarikan Kesimpulan. Adapun penelitian ini berlangsung selama satu bulan di bulan januari 2025. Adapun lokus penelitian ini berada di lingkup Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan analisis melalui Teori *Political will* oleh Brinkerhoff (2010). Adapun analisis mendalam dilakukan melalui analisis dimensinya yang meliputi Inisiatif Pemerintah, Prioritas, Mobilisasi Para Pihak, Komitmen Publik dan Alokasi Sumber Daya, Penegakan Hukum, Kontinuitas Usaha, dan Adaptasi dan Belajar dijabarkan sebagai berikut :

#### 3.1 Inisiatif Pemerintah

Dimensi inisiatif pemerintah merujuk pada kesediaan dan kemampuan aktor pemerintah dalam mengambil langkah proaktif untuk mengatasi suatu permasalahan kebijakan. Inisiatif ini menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah bersedia mengambil tindakan tanpa harus menunggu tekanan eksternal. Inisiatif pemerintah dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti penyusunan kebijakan baru, pengalokasian sumber daya yang memadai, serta penguatan koordinasi lintas sektor dalam melaksanakan kebijakan. Dalam konteks penurunan *stunting* di Kota Banjarbaru, inisiatif pemerintah dapat terlihat dari bagaimana pemerintah daerah telah melaksanakan sejumlah strategi guna memastikan program penurunan *stunting* berjalan dengan efektif dan berkelanjutan. Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Kesehatan memiliki komitmen yang kuat untuk menurunkan angka *stunting* di Kota Banjarbaru. Segala bentuk upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru melalui Dinas Kesehatan dalam menanggulangi angka adanya kasus *stunting* yang merupakan masalah holistik di Indonesia dan di Kota Banjarbaru yang hingga saat ini masih mengancam masa depan anak yang ada di setiap daerah kecamatan di Kota Banjarbaru.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 141, Dinas Kesehatan khususnya puskesmas Kecamatan Banjarbaru Selatan sudah memiliki peran aktif dalam pencegahan dan penurunan *stunting* serta merekrut kader posyandu dalam membantu dalam pelayanan masyarakat, puskesmas kecamatan Banjarbaru Selatan juga mendata seluruh masyarakat kecamatan Banjarbaru Selatan yang memiliki status *stunting* dan rentan terjadinya *stunting* sehingga akan lebih diberikan perhatian dalam pencegahan dan penurunan *stunting*.

Selain itu, berdasarkan Laporan TPPS Semester II Tahun 2024 Kota Banjarbaru, pada indikator Pilar 4.A1 menyatakan "Persentase keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi: 2,62%". Angka ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil

dari keluarga berisiko yang memanfaatkan pekarangan untuk mencukupi kebutuhan pangan bergizi, padahal potensi pemanfaatan lahan rumah dapat membantu meningkatkan ketahanan gizi keluarga. Perlu program intensif pelatihan urban farming dan bantuan bibit/tanaman serta turut berkolaborasi Dinas Pertanian Kota Banjarbaru. Kebijakan serta komitmen program yang dijalankan oleh pemerintah daerah bersama puskesmas di Kecamatan Banjarbaru Selatan mendapat respon positif dari masyarakat. Program-program tersebut memberikan dampak yang baik, terutama dalam peningkatan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan layanan posyandu.

Pelaksanaan sosialisasi penurunan stunting di Kota Banjarbaru melibatkan berbagai pihak mulai dari Dinas Kesehatan Kota sebagai koordinator utama, tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, dan ahli gizi, kader posyandu, organisasi PKK, tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta dukungan dari sektor swasta dan lembaga non-pemerintah. Keterlibatan aktif dari Walikota Banjarbaru dan para camat juga menjadi faktor penting dalam mendorong kesuksesan program ini, sementara ibu-ibu hamil, pasangan usia subur, dan keluarga dengan balita menjadi sasaran utama edukasi untuk memastikan pengetahuan tentang pencegahan stunting dapat diimplementasikan langsung dalam kehidupan sehari-hari.

### 3.2 Prioritas

Dimensi prioritas dalam teori political will mengacu pada sejauh mana suatu isu kebijakan ditempatkan sebagai agenda utama dalam pemerintahan. Sebuah kebijakan yang diprioritaskan akan mendapatkan perhatian lebih besar dalam aspek perencanaan, penganggaran, serta implementasi program. Dari hasil wawancara dengan informan yang bersangkutan, diperoleh informasi bahwa setiap tahunnya selalu dilakukan kajian mendalam untuk merelevansikan program yang akan dijalankan, baik itu untuk program 1000 HPK, Pemberian Tablet Tambah Darah, maupun Pemberian Makanan Tambahan pembaharuan terkait kebijakan dan program tersebut didapatkan berdasarkan forum-forum yang sudah dijadwalkan seperti Forum Perangkat Daerah, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Survey Mawas Diri (SMD), Musyawarah Masyarakat Desa (MMD). Hal tersebut sudah di validasi dengan pernyataan dari Ahli Gizi Puskesmas Banjarbaru Selatan.

**Tabel 1**

No	Kecamatan	Kelurahan	Prevalensi Stunting			
			2021	2022	2023	2024
1	Landasan Ulin	Guntung Payung	12.96	7.73	7.17	3.7
2		Syamsudin Noor	8.55	3.23	3.83	2.07
3		Landasan Ulin Timur	17.33	11.61	16.92	7.35
4		Guntung Manggis	8.80	9.74	15.80	4.78
5	Liang Anggang	Landasan Ulin Utara	18.99	22.87	21.39	11.13
6		Landasan Ulin Tengah	18.72	17.45	24.17	11.49
7		Landasan Ulin Barat	23.77	9.69	15.04	7.25
8		Landasan Ulin Selatan	27.41	9.32	18.79	9.64
9	Cempaka	Palam	11.88	16.00	10.98	5.75
10		Bangkal	21.55	18.27	13.03	9.04
11		Sungai Tiung	26.78	16.62	11.90	11.48
12		Cempaka	20.63	17.22	15.77	5.56
13		Loktabat Utara	10.69	7.02	9.78	2.13

14	Banjarbaru Utara	Mentaos	12.43	7.82	9.09	3.7
15		Komet	3.03	4.35	2.71	2.13
16		Sungai Ulin	4.45	8.22	18.14	3.13
17	Banjarbaru Selatan	Loktabat Selatan	17.44	11.33	11.78	3.62
18		Kemuning	22.67	27.87	15.07	7.87
19		Guntung Paikat	22.03	20.57	11.44	5.57
20		Sungai Besar	15.25	19.51	5.33	1.41
		<b>KOTA BANJARBARU</b>	<b>17.10</b>	<b>13.62</b>	<b>13.94</b>	<b>5.32</b>

Sumber : E-PPGBM Dinas Kesehatan, 2024

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan penurunan signifikan prevalensi stunting di seluruh kelurahan di Kota Banjarbaru dari tahun 2021 hingga 2024.. Kelurahan dengan penurunan paling drastis antara 2021–2024 di antaranya adalah Sungai Besar (dari 15,25% menjadi 1,41%), Guntung Paikat (dari 22,03% menjadi 5,57%), serta Loktabat Selatan (dari 17,44% menjadi 3,62%). Namun, beberapa kelurahan sebelumnya sempat menunjukkan lonjakan sebelum akhirnya menurun, seperti Sungai Ulin yang meningkat tajam pada 2023 menjadi 18,14% lalu turun menjadi 3,13% di 2024. Dalam hal ini lokasi penelitian lebih berfokus pada Kecamatan Banjarbaru Selatan karena memiliki stunting dengan angka terendah dan menjadi percontohan Kota Banjarbaru.

### 3.3 Mobilisasi Para Pihak

Keterlibatan berbagai pihak dalam perumusan dan implementasi kebijakan diyakini mampu membangun sinergi yang berkontribusi terhadap keberhasilan suatu program atau kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah. Terkait mobilisasi para pihak dalam mengentaskan permasalahan *stunting* pemerintah kota Banjarbaru sudah melibatkan para pihak lain yang disebut pentahelix, yaitu keterlibatan pihak– pihak lain seperti akademisi, organisasi masyarakat, media massa, pihak swasta dan OPD lainnya. *Political will* pemerintah daerah Kota Banjarbaru dalam pelaksanaan percepatan program penurunan *stunting* yang melibatkan berbagai instansi maka akan meningkatkan suatu kerjasama antar instansi untuk melakukan pencegahan dan penurunan *stunting* tidak hanya dari pihak kecamatan dan juga Dinas Kesehatan tapi juga merupakan suatu tantangan bersama yang harus diatasi melalui upaya bersama.

Wawancara yang dilakukan dengan informan tersebut mengungkapkan bahwa mobilisasi para pihak dalam program–program percepatan penurunan *stunting* seperti 1000 HPK, Pemberian Tablet Tambah Darah, Pemberian Makanan Tambahan sudah dilakukan, serta melibatkan pentahelix atau pihak–pihak seperti unsur akademisi, masyarakat sipil, media massa, sektor swasta, jajaran RT, RW serta instansi pemerintahan lainnya lain sudah dilibatkan dalam kontribusi program percepatan penurunan *stunting*.

Pelibatan para pihak yang dalam hal ini disebut pentahelix diimplementasikan dengan menjalankan program kerjasama, untuk ranah akademisi seperti Universitas Lambung Mangkurat dan STIKES Husada Borneo Banjarbaru, pihak Dinas Kesehatan sudah melaksanakan kegiatan MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) dengan turun ke masyarakat. Ranah bisnis sendiri pihak Dinas Kesehatan bersama dengan PT. PLN Kalselteng membuat kegiatan kemitraan dengan mendampingi ibu hamil dan PLN yang mendapat PMT. Seperti yang dikemukakan oleh Kadiwaraka, keterlibatan berbagai elemen dinilai mampu membangun kolaborasi yang kuat dalam mendukung keberhasilan implementasi program maupun kebijakan pemerintah. Dukungan terhadap pandangan ini tercermin dalam Peraturan

Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, khususnya pada Pasal 17, yang menegaskan bahwa pemerintah dari tingkat pusat hingga desa wajib melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mengatasi permasalahan *stunting* di wilayah masing-masing.

**Tabel 2**

No	Kegiatan	Pelaksana	Lokasi
1	Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja dan Konseling Gizi Remaja	Dinas Kesehatan, Puskesmas, TP PKK	Sekolah-sekolah dan Puskesmas
2	Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) untuk Remaja Putri	Dinas Kesehatan, Sekolah, Puskesmas	Sekolah tingkat SMP/SMA
3	Kelas Ibu Hamil dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT)	Dinas Kesehatan, Puskesmas	Seluruh kelurahan di Kota Banjarbaru

Sumber : Diolah oleh Peneliti (2025)

### 3.4 Komitmen Publik dan Alokasi Sumber Daya

Dimensi ini menekankan pentingnya keterlibatan publik serta keseriusan pemerintah dalam menyediakan sumber daya yang cukup untuk keberhasilan suatu kebijakan. Komitmen publik mencerminkan adanya transparansi serta partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan, sementara alokasi sumber daya memastikan bahwa kebijakan dapat dijalankan dengan baik. Pelaksanaan program percepatan penurunan *stunting* pada sejatinya tidak terlepas dari komitmen publik, dan penyediaan alokasi sumber daya seperti sumber daya manusia serta penyediaan anggaran. Suatu kebijakan dapat dikatakan berjalan secara efektif apabila kebijakan tersebut mempunyai struktur pelaksanaan dan pembiayaan yang jelas, serta adanya komitmen publik sehingga masyarakat dapat memantau apakah kebijakan tersebut dijalankan sesuai aturan atau terjadi penyimpangan dalam implementasinya. Penganggaran untuk pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* di Kota Banjarbaru pada tahun 2024 dialokasikan pada 12 (dua belas) SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dengan anggaran sebesar Rp. 66.354.780.566,00 (Enam Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah). Dinas Kesehatan sendiri mendapat anggaran sebesar Rp. 24.143.344.106,00 (Dua Puluh Empat Miliar Seratus Empat Puluh Tiga Ratus Empat Puluh Empat Seratus Enam Rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari informan, didapatkan hasil bahwa terkait komitmen publik sejauh ini dapat dikatakan positif baik untuk program 1000 HPK, Pemberian TTD maupun PMT, lalu dari segi anggaran pihak Dinas Kesehatan menyatakan bahwa anggaran terkait percepatan penurunan *stunting* sangat memadai hingga puskesmas setiap kecamatan. Begitupun dengan aspek sumber daya manusia, aspek sumber daya manusia yang cukup dalam menjalankan implementasi program percepatan *stunting* walaupun sudah menemukan solusi terkait permasalahan tersebut seperti merekrut tenaga honorer untuk membantu pelaksanaan program di puskesmas, namun seperti yang dikemukakan oleh pihak puskesmas bahwa hal tersebut tetap menjadi kendala yang berarti dalam menjalankan program percepatan penurunan *stunting* seperti 1000 HPK, Pemberian TTD dan PMT di lingkup

puskesmas serta sesuai dengan wilayah kecamatan dan kelurahan masing-masing.

Aspek alokasi sumber daya, khususnya dalam hal pemanfaatan anggaran dan ketersediaan sumber daya manusia, merupakan elemen krusial dalam upaya percepatan penurunan *stunting*, maka hasil wawancara mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Banjarbaru perlu memberikan perhatian lebih terhadap optimalisasi penggunaan anggaran di tingkat pelaksana, terutama di puskesmas. Hal ini sejalan dengan mandat yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan dari pembiayaan ini adalah untuk menjamin kesinambungan pendanaan, memastikan ketersediaan anggaran yang memadai, alokasi yang merata, serta penggunaan yang efektif demi tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Jika dilihat lebih spesifik, Kecamatan Banjarbaru Selatan memiliki sebaran yang seimbang dengan total 12 tenaga gizi, masing-masing 4 orang di Puskesmas Banjarbaru Selatan, Sungai Besar dan Sungai Ulin. Jumlah ini cukup ideal bila dibandingkan dengan puskesmas lain seperti Liang Anggang yang hanya memiliki 2 tenaga gizi di satu puskesmas. Dengan demikian, Banjarbaru Selatan dapat dijadikan pembanding yang representatif, karena meskipun jumlah puskesmasnya lebih sedikit, kecukupan tenaga gizi tetap terpenuhi dan sesuai standar

### **3.5 Penegakan Hukum**

Dimensi penegakan hukum dalam teori *political will* yang dikemukakan oleh Brinkerhoff mengacu pada sejauh mana pemerintah menunjukkan komitmen dalam menegakkan regulasi dan kebijakan yang telah dibuat. Penegakan hukum menjadi indikator penting dalam melihat keseriusan pemerintah dalam melaksanakan suatu kebijakan, termasuk dalam upaya penurunan *stunting*. Penegakan Hukum pada *political will* Kota Banjarbaru Hal ini ditinjau dari aspek landasan hukum, baik di tingkat nasional maupun daerah. Landasan hukum merupakan acuan normatif yang menjadi dasar dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintahan. Di tingkat nasional, terdapat sejumlah regulasi yang mendukung upaya penurunan prevalensi *stunting*. Beberapa di antaranya yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah. Selain itu, kebijakan ini juga diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, serta Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 yang mengatur tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi. Dukungan lainnya datang melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), serta Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (RAN-PG), termasuk pedoman penyusunan RAD-PG serta mekanisme pemantauan dan evaluasi RAN/RAD-PG. Di samping itu, terdapat juga Surat Keputusan Menko Kesra Nomor 11 Tahun 2014 yang membentuk Tim Teknis Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, serta SK Deputi SDM Bappenas Nomor 37/D1.1/06/2014 mengenai pembentukan Kelompok Kerja Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.

Pemerintah Kota Banjarbaru telah menetapkan dasar hukum yang secara khusus mengatur upaya penanganan *stunting* melalui Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*. Selain itu, landasan hukum implementasi program peningkatan gizi juga diperkuat dengan adanya RPJMD Kota Banjarbaru 2021–2026, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru 2021–2026, serta Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru untuk periode yang sama.

Keberhasilan Pemerintah Kota Banjarbaru dalam melaksanakan kebijakan perbaikan gizi tercermin dari data tahun 2024 yang menunjukkan persentase balita *stunting* yang telah mendapatkan layanan kesehatan secara optimal :

Tabel 3

No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah balita <i>Stunting</i> ditemukan	Jumlah balita <i>Stunting</i> yang mendapat pelayanan kesehatan	Persentase (%)
1	Landasan Ulin	Guntung Manggis	525	525	100,00
		Guntung Payung	86	86	100,00
		Landasan Ulin Timur	372	372	100,00
		Syamsudin Noor	367	367	100,00
2	Liang Anggang	Landasan Ulin Barat	65	65	100,00
		Landasan Ulin Selatan	180	180	100,00
		Landasan Ulin Tengah	173	173	100,00
		Landasan Ulin Utara	467	467	100,00
3	Cempaka	Bangkal	214	214	100,00
		Cempaka	814	814	100,00
		Palam	58	58	100,00
		Sungai Tiung	275	275	100,00
4	Banjarbaru Utara	Komet	11	11	100,00
		Mentaos	87	87	100,00
		Loktabat Utara	341	341	100,00
		Sungai Ulin	319	319	100,00
5	Banjarbaru Selatan	Guntung Paikat	290	290	100,00
		Kemuning	129	129	100,00
		Loktabat Selatan	162	162	100,00
		Sungai Besar	119	119	100,00
Jumlah			5.154	5.154	100,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, 2024

Berdasarkan data yang disajikan, tercatat sebanyak 5.154 anak dengan kondisi *stunting* di Kota Banjarbaru telah memperoleh layanan kesehatan secara merata. Meski demikian, upaya Pemerintah Kota Banjarbaru belum sepenuhnya tuntas, karena target utama yang hendak dicapai adalah kondisi *zero stunting* atau nihil kasus *stunting*, guna menciptakan kota yang bebas dari masalah kekurangan gizi kronis.

### 3.6 Kontinuitas Usaha

Dalam konteks penurunan *stunting*, kontinuitas usaha dapat terlihat dari keberlanjutan program yang telah dirancang, adanya mekanisme evaluasi berkala, serta komitmen untuk tetap mengalokasikan anggaran meskipun terjadi perubahan prioritas dalam pemerintahan. Keberlanjutan program terkait percepatan penurunan *stunting* seperti 1000 HPK, Pemberian Tablet Tambah Darah dan juga Pemberian PMT menjadi sangat penting tetap dilaksanakan dengan menerapkan kaidah-kaidah yang menjadikan program-program tersebut menjadi relevan digunakan dari masa ke masa. Berdasarkan piagam Ottawa Charter ditegaskan bahwa konsep kesehatan untuk semua hanya dapat dicapai secara berkelanjutan, yang berarti bahwa implementasi program-program kesehatan harus dilakukan secara konsisten dan

berkesinambungan guna mencapai hasil yang diharapkan. Melalui wawancara bersama informan, diketahui bahwa dalam aspek keberlanjutan program terkait percepatan penurunan *stunting* di kota Banjarbaru sudah dijalankan sejak lama, lalu tentunya dengan penambahan inovasi-inovasi yang menjadikan program ini tetap terus bisa dijalankan walaupun permasalahan yang terjadi dimasyarakat selalu dinamis.

Prevalensi *Stunting* 2024 sebesar 5,32 % rendah dari target yang ditetapkan sebesar 14 %, semakin rendahnya prevalensi *stunting* dari target maka semakin baik, dimana jumlah balita yang sangat pendek dan balita pendek lebih sedikit dari jumlah balita dengan status gizi normal dan status gizi tinggi. Secara spesifik komitmen keberlanjutan program percepatan penurunan *stunting* di Kota Banjarbaru sendiri tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diatur dalam Peraturan Daerah No 7 Tahun 2021 Tentang RPJMD 2021 – 2026 dikemukakan dalam tujuan untuk membangun kualitas kehidupan masyarakat dengan meningkatkan merata kesehatan masyarakat, Pemerintah Kota Banjarbaru berkomitmen untuk menurunkan persentase balita *stunting*.

### **3.7 Adaptasi dan Belajar**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan didapatkan hasil bahwa dalam aspek belajar dan beradaptasi yang dilihat dari frekuensi monitoring dan evaluasi terhadap program – program percepatan *stunting* yaitu 1000 HPK, Pemberian TTD, dan PMT sudah dilaksanakan secara berkala dan terjadwal, terkait 1000 HPK dan PMT dari hasil monitoring dan evaluasinya tidak ada kendala yang berarti, namun untuk pemberian TTD masih menemui kendala yaitu belum adanya pemantauan terkait kepatuhan minum tablet tambah darah, hingga saat ini yang menjadi fokus pemberian TTD hanya distribusinya saja, untuk kepatuhan minum TTD belum dilakukan dan berlandaskan pandangan subjektif atau estimasi saja. Namun sudah ada inovasi dengan melibatkan forum Generasi Berencana (GENRE) untuk dilakukannya minum tablet tambah darah bersamaan dalam satu waktu. disebutkan bahwa kebijakan, institusi dan struktur yang ditetapkan perlu beradaptasi dengan dinamika perubahan kondisi yang tidak pasti dan cepat, sehingga kebijakan yang telah ditetapkan tersebut dapat tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan jangka panjang. Artinya aspek belajar dan beradaptasi menjadi hal yang penting, secara khusus frekuensi monitoring dan evaluasi yang terjadwal dapat meningkatkan efektifitas dan merelevansikan suatu program.

Hal ini didukung dengan dibuatnya Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Strategi Nasional Percepatan Pencegahan *Stunting* Periode 2018–2024 yang mengemukakan bahwa Monitoring dan Evaluasi menjadi salah satu hal penting dalam konteks percepatan pencegahan *stunting*. Secara umum, tujuan dari MONEV adalah untuk memantau perkembangan program, peningkatan akuntabilitas dan juga untuk pembelajaran. Pada komponen frekuensi pelaksanaan MONEV dikatakan bahwa MONEV dilakukan secara rutin/berkala, berkelanjutan, cepat, deskriptif, melacak indikator kunci dari pelaksanaan program hingga capaian program dengan keberhasilan/kegagalan, pembelajaran.

### **3.8 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Temuan utama penelitian ini mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Banjarbaru telah mendemonstrasikan political will yang kuat dalam upaya penurunan *stunting*, yang termanifestasi melalui inisiatif strategis dan kebijakan konkret. Langkah signifikan ini terlihat dari peluncuran program BASINGSING (Banjarbaru Singkirkan Stunting) pada awal tahun 2023, yang merupakan program komprehensif melibatkan berbagai sektor untuk mengatasi *stunting*. Program ini diikuti dengan penerbitan Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang memberikan landasan hukum dan operasional bagi upaya penurunan *stunting* di kota tersebut. Analisis

dokumen kebijakan dan wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan mengungkapkan bahwa Perwali ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen regulasi, tetapi juga sebagai katalis untuk mobilisasi sumber daya lintas sektor. Data dari Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru menunjukkan bahwa sejak implementasi program BASINGSING dan Perwali tersebut, terjadi peningkatan signifikan dalam cakupan intervensi gizi spesifik, dengan kenaikan sebesar 15% dalam pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita dalam enam bulan pertama tahun 2023. Lebih lanjut, observasi lapangan dan wawancara dengan tokoh masyarakat mengindikasikan peningkatan kesadaran publik tentang stunting, dengan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan posyandu meningkat 30% dibandingkan tahun sebelumnya. Temuan-temuan ini menegaskan bahwa political will Pemerintah Kota Banjarbaru tidak hanya terbatas pada retorika, tetapi telah diterjemahkan ke dalam aksi nyata dan kebijakan yang berdampak, menciptakan momentum positif dalam upaya penurunan stunting di kota tersebut. Hasil ini berbeda dengan penelitian di Kabupaten Jombang yang juga berhasil dalam pelaksanaan political will tetapi pada penanganan kemiskinan (Azizah et al., 2020)

Temuan utama selanjutnya dalam penelitian ini mengungkapkan komitmen finansial dan optimalisasi sumber daya manusia yang signifikan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru dalam upaya penurunan stunting. Analisis dokumen anggaran daerah menunjukkan adanya pengalokasian dana yang substansial melalui berbagai sumber, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana insentif fiskal dari APBN. Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru, alokasi DAK untuk program penurunan stunting meningkat sebesar 25% pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai Rp 15 miliar. Selain itu, wawancara dengan pejabat Dinas Kesehatan mengungkapkan adanya dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) yang signifikan dari mitra swasta, khususnya PT PLN Kalselteng, yang berkontribusi sekitar Rp 2 miliar untuk program gizi dan kesehatan ibu dan anak. Temuan ini merefleksikan political will yang kuat dalam hal komitmen anggaran. Sementara itu, observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan tenaga kesehatan dan kader gizi mengungkapkan upaya optimalisasi SDM yang intensif. Meskipun dihadapkan pada tantangan keterbatasan jumlah personel, dengan rasio tenaga gizi terhadap populasi masih di bawah standar WHO (1:30.000 dibandingkan standar 1:20.000), Pemerintah Kota Banjarbaru telah mengimplementasikan strategi inovatif. Salah satunya adalah program pelatihan intensif yang meningkatkan kapasitas 150 kader gizi dalam enam bulan terakhir, serta pengembangan sistem rotasi tenaga kesehatan untuk menjangkau daerah-daerah prioritas stunting. Temuan-temuan ini menggambarkan bahwa meskipun menghadapi kendala SDM, political will pemerintah daerah termanifestasi dalam upaya kreatif untuk memaksimalkan efektivitas sumber daya yang ada dalam penurunan stunting. Hasil ini sama dengan penelitian di Kabupaten Pemalang yang juga mampu memanfaatkan sumber daya manusia dan komitmen finansial dalam penyelesaian stunting (Mudi et al., 2022)

### 3.9 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Disamping hal hal utama yang dibahas, dalam penelitian ini juga ditemukan beberapa faktor pendukung keberhasilan program ini meliputi komitmen kepemimpinan daerah yang kuat, pelaksanaan intervensi terintegrasi secara tepat sasaran dan kolaborasi antar dinas dan inovasi daerah. Setelah dilakukan penelitian maka didapati temuan dimensi tambahan selain 7 dimensi *political will* dari teori Brinkerhoff yakni geografis dan sosial budaya.

## IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan Pelaksanaan Political Will Pemerintah Daerah Dalam Penurunan Stunting Di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan sudah dilakukan dengan cukup optimal tetapi masih perlu peningkatan agar mencapai kata maksimal. **Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini menghadapi beberapa keterbatasan yang perlu diakui.

Waktu yang terbatas menjadi kendala utama, membatasi kedalaman dan cakupan analisis. Keterbatasan anggaran turut mempengaruhi skala dan intensitas pengumpulan data. Akses geografis yang menantang ke lokasi penelitian menghambat observasi langsung yang lebih ekstensif. Terakhir, keterbatasan pengetahuan penulis dalam beberapa aspek teknis mungkin mempengaruhi interpretasi temuan. Meski demikian, penelitian ini berupaya memberikan wawasan berharga dalam konteks yang ada, sambil mengakui perlunya studi lanjutan untuk memperdalam pemahaman tentang topik ini

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari bahwa tidak semua hal dibahas dalam penelitian ini, penelitian ini tidak mengulik secara mendalam terkait peran media dalam mempengaruhi keberhasilan *political will* ini, sehingga investigasi peran media sosial dan teknologi digital dalam membentuk dan mempengaruhi *political will* pemerintah daerah terkait isu stunting di Kalimantan Selatan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam perjalanan menyelesaikan penelitian ini, penulis dipenuhi rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Keberhasilan ini tak lepas dari peran berbagai pihak yang telah memberikan dukungan tak ternilai. Dari kedua orang tua yang telah mencurahkan kasih sayang dan didikan tanpa batas, hingga jajaran pimpinan IPDN dan para dosen yang telah membagikan ilmu berharga. Secara khusus, penulis menghaturkan terima kasih yang tulus kepada Bapak Dr. Andi Azikin, M.Si, yang telah membimbing dengan penuh dedikasi dan kebijaksanaan, menjadi mentor yang menginspirasi sepanjang proses penelitian. Tak terlupakan pula kontribusi para sahabat yang telah berperan penting dalam membentuk karakter penulis.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Acs, A. (2021). Presidential directives in a resistant bureaucracy. *Journal of Public Policy*, 41(4), 776–797. <https://doi.org/10.1017/S0143814X20000264>
- Amalya, N. (2023). Komitmen Politik Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kecamatan Bone Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara. *Repositoryipdn*, 11(1), 1–14. <http://eprints.ipdn.ac.id/16231/1/RINGKASANN%20SKRIPSI%20NANDA.pdf>
- Azizah, W. I., Mahmudah, Z., & Kriswibowo, A. (2020). Political Will Pemerintah Kabupaten Jombang terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Masyarakat Desa Political Will of Jombang District Government on Poverty Reduction in Village Communities. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Politik*, 1(April), 50–62. <http://www.jsep.sasanti.or.id/index.php/jsep/article/view/6%0Ahttps://www.jsep.sasanti.or.id/index.php/jsep/article/viewFile/6/11>
- Brinkerhoff, D. (2010). Unpacking the concept of political will to confront corruption. *U4 Brief*, 1, 1–4. <https://www.cmi.no/publications/file/3699-unpacking-the-concept-of-political-will-to.pdf>
- Daniel, D., Tone, K., Latief, A., & Nadir, M. (2021). Komitmen Pemerintah Daerah Dalam Menangani Stunting Pada Kelurahan Mamasa Kabupaten Mamasa. *Journal Pegguruang: Conference Series*, 3(1), 233. <https://doi.org/10.35329/jp.v3i1.1631>
- Gitasavitri, R., Daraba, D., Azikin, A., & Masrich, A. (2024). Implementation of the Stunting Handling Policy in Sumedang Regency , West Java Province. *Jurnal Scientia*, 13(03), 276–290. <https://www.infor.seaninstitute.org/index.php/pendidikan/article/view/2498/2217>
- Ilham, T., & Sari, A. G. P. (2024). Political Party Financing Regulation and Gaps for Corporate Donations: Case of the Developing Country. *Journal of Governance and Regulation*,

- 13(1), 28–41. <https://doi.org/10.22495/jgrv13i1art3>
- Indriyani, D., & Yuanjaya, P. (2023). Political Will Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dalam Kebijakan Penanganan Kasus Stunting Tahun 2016-2020. *Journal Of Public Policy and Administration Research*, 08(04), 1–14. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21831/joppar.v8i4.21195>
- Lacombe, S. J., & Boehmke, F. J. (2021). The Initiative Process and Policy Innovation in the American States. *State Politics and Policy Quarterly*, 21(3), 286–305. <https://doi.org/10.1017/spq.2021.1>
- Mastaldiah. (2020). *Political will Pemerintah Kota Palembang Dalam Mengatasi Stunting*. UIN Raden Fatah Palembang, (Vol. 2507, Issue February). <https://repository.radenfatah.ac.id/9611/1/MASTALDIAH.pdf>
- Mudi, S. D., Turtiantoro, & Erowati, D. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Dalam Penurunan Dan Penanggulangan Stunting Di Desa Longkeyang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang Tahun 2021. *Journal of Politic and Government Studies*, 11(4), 105–117. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/35928>
- Pepinsky, T. (2018). Everyday Political Engagement in Comparative Politics. *PS - Political Science and Politics*, 51(3), 566–569. <https://doi.org/10.1017/S1049096518000483>
- Salsabila, M., Wasistiono, S., & Rusfiana, Y. (2024). Strategic Management Model For Government Agency Performance Accountability System Of Bekasi Regency , West Java Province. *Jurnal Scientia*, 13(04), 1644–1659. <https://www.infor.seaninstitute.org/index.php/pendidikan/article/view/2669/2378>
- Saragih, M., Supriatna, T., Lukman, S., & Mulyanti, D. (2019). Political Interaction in the Process of Establishing the Regional Budget of North Sumatera Province. *International Journal of Science and Society*, 1(2), 59–70. <https://doi.org/10.54783/ijsoc.v1i2.19>
- Scott, P. (2013). (Political) Constitutions and (Political) Constitutionalism. *German Law Journal*, 14(12), 2157–2183. <https://doi.org/10.1017/S2071832200002716>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan* (3rd ed.). Alfabeta, Bandung.
- Soemaatmadja, R., Supriatna, T., Rowa, H., & Kusworo. (2020). Ideal Model in the Implementation of National Insight Policies for Handling Social Conflict in Pandeglang Regency. *International Journal of Science and Society*, 2(4), 253–265. <https://doi.org/10.54783/ijsoc.v2i4.210>
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif). *Alfabeta Publication*, 1–274. <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Trijuliana, D., Rizki, F., & Argenti, G. (2020). Komitmen Politik : Penegakan Hukum & Keberlanjutan Usaha Pemerintah Kota Tasikmalaya Dalam Upaya Menurunkan Angka Stunting. *Journal of Government and Political Studies*, June.
- Wihardja, M. M., & Pepinsky, T. B. (2011). Decentralization and economic performance in Indonesia. *Journal of East Asian Studies*, 11(3), 337–371. <https://doi.org/10.1017/S1598240800007372>